

Judul : RUU Pemilu: kodifikasi akan dibahas lewat panitia khusus
Tanggal : Senin, 17 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

RUU PEMILU

Kodifikasi Akan Dibahas lewat Panitia Khusus

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu direncanakan dimulai pada pertengahan 2026 dan kemungkinan besar dilakukan melalui panitia khusus. Menguat pula wacana agar materi RUU tersebut dikodifikasi bersama dua RUU lain, yakni RUU Pemilihan Kepala Daerah dan RUU Partai Politik.

Terkait hal tersebut, DPR dan pemerintah diingatkan segera merampungkan pembahasan karena waktu kian sempit dan tahapan teknis Pemilu 2029 segera dimulai, setidaknya tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arse Sadikin Zulfikar, saat ditemui di Jakarta, Minggu (16/11/2025), mengatakan, DPR memahami kuatnya dorongan publik agar RUU Pemilu segera dibahas. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, diputuskan RUU Pemilu dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2026. Komisi II DPR juga ditugasi menyusun RUU tersebut, termasuk naskah akademik dan drafnya.

"Kami di Komisi II sudah sepaham, bahkan sudah sepakat, bahwa begitu awal tahun 2026, saat memasuki masa sidang, akan dibentuk panitia kerja (panja). Panja penyusunan RUU, belum pembahasan," ujar Arse.

Jika merujuk jajak pendapat Litbang Kompas, sekitar 60 persen responden mendesak agar RUU Pemilu segera dibahas. Sebab, ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak kunjung ditindaklanjuti, seperti ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, serta pemisahan pemilu nasional dan daerah. Publik berharap pembahasan lebih awal memungkinkan pendalaman materi yang lebih substantif dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih besar.

Dua RUU lain

Arse meyakini, DPR dan pemerintah masih memiliki waktu yang cukup untuk membahas RUU Pemilu. Jika merujuk aturan, perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode berikutnya baru dimulai pada akhir 2026.

Arse menambahkan, ada wacana kuat agar pembahasan RUU Pemilu dikodifikasi dengan dua RUU lain, yakni RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan RUU Partai Politik (Parpol). Ia berdalih alasan utamanya adalah DPR mengikuti putusan MK bahwa rezim pemilu hanya satu.

"Tidak ada lagi rezim lain, pilkada menjadi rezim pemilu untuk apa kalau sudah satu rezim, rezim pemilu kita buat lagi. Apalagi pemilu serentak daerah, pemilu serentak nasional," kata Arse.

Ia tak memungkiri bahwa dengan masuknya RUU Pilkada dan RUU Parpol akan ada sejumlah penyesuaian dalam kedua RUU tersebut. "Di UU Pemilu, kan, kita bicara soal aktor. Tetapi, aktornya baru soal penyelenggara, baru pasangan calon, calon anggota legislatif, ya, kan. Partainya belum. Kenapa enggak sekalian dimasukkan ke situ, ke RUU Pemilu," ucapnya.

Dengan hal tersebut, menurut Arse, konsekuensi logisnya adalah pembahasan akan dilakukan melalui panitia khusus (pansus) yang melibatkan anggota DPR lintas komisi. Ia berpandangan hal ini wajar karena persoalan pemilu menyangkut berbagai lini dan setiap revisi aturan pemilu juga selalu menggunakan pansus.

Komunikasi politik

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyatakan, setiap parpol masih berkomunikasi terkait RUU Pemilu. Meskipun belum di-

Dinamika dan komunikasi antar fraksi sangat bagus.

Ahmad Irawan

bahas oleh DPR, Irawan menekankan dialog antarfraksi terus bergulir dan mereka memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya pembahasan revisi UU ini.

"Dinamika dan komunikasi antarfraksi sangat bagus. Kami punya pandangan yang sama bahwa RUU Pemilu harus bisa dibahas lebih awal. Proses dialog ini juga untuk mendapatkan *meaningful participation* (partisipasi bermakna)," ujarnya.

Irawan mengungkapkan alasan pembentukan Panja RUU Pemilu kemungkinan besar baru akan dilaksanakan pada Januari 2026. Dia menyebutkan, waktu masa sidang kali ini, yang akan berakhir di awal Januari, dinilai terlalu pendek, sementara ada sejumlah RUU yang perlu diputuskan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menyampaikan, Kemendagri menghormati harapan masyarakat agar RUU Pemilu—sebagai bagian dari paket RUU Politik (RUU Partai Politik, RUU Pemilu, dan RUU Pilkada)—segera dibahas.

"Sejalan dengan harapan itu, saat ini Kemendagri melalui Ditjen (Direktorat Jenderal) Politik dan Pemerintahan Umum serta Ditjen Organisasi Daerah sedang mempersiapkan konsep penataan paket RUU Bidang Politik dan Pemerintahan Daerah dimaksud," kata Benni.

Kemendagri terus mencermati dan mendalami sejumlah putusan MK berkaitan dengan

kepemiluan ini, seperti Putusan MK Nomor 135 Tahun 2025 soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Selain itu, diskusi internal Kemendagri tentang desain RUU Bidang Politik dan Pemda juga masih terus dilaksanakan.

Waktu sempit

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berpendapat RUU Pemilu yang belum dibahas saat ini berkaitan dengan kepentingan politik dan skala prioritas para pembuat undang-undang.

Firman pun mengingatkan para elite partai dan legislator untuk menangkap keresahan publik terkait pentingnya revisi UU Pemilu. Apalagi, waktu yang ada semakin sempit karena dalam waktu dekat rangkaian teknis pelaksanaan Pemilu 2029 akan berlangsung.

Kegelisahan ini, lanjut Firman, bisa terkait penyelenggaraan pemilu setelah beberapa kali putusan MK. Di samping itu, ada juga permasalahan terkait pengaturan teknis penyelenggaraan yang harus dipikirkan dalam waktu dekat.

"Ada kepentingan terkait sistem pemilu yang mana akan diterapkan. Sebagian menginginkan proporsional terbuka, sebagian juga mulai berpikir tertutup. Kalangan aktivis juga mulai membicarakan kemungkinan pemilu campuran," kata Firman.

Penyelenggaraan yang bersih dan jauh dari politik uang, lanjut Firman, juga menjadi harapan publik. Semuanya perlu diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu pemilu yang bersih.

Firman berharap pembahasan RUU Pemilu nantinya menghasilkan sistem yang menciptakan pemilu berintegritas. Hal itu membutuhkan kemauan politik yang tidak hanya mengedepankan kepentingan para elite. (RTG/BOW)